

**MAJELIS BUDDHAYANA INDONESIA MEMBANGUN BINADAMAI
ANTAR UMAT BERAGAMA**

Jonry Sitorus, Muhammad Iqbal

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Medan
jonrysitorus26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Majelis Buddhayana Indonesia sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan dalam menciptakan dan membangun binadamai antar umat beragama di Tanjung Balai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya Majelis Buddhayana Indonesia dalam mengelola isu-isu konflik paska pembakaran vihara Tri Ratna di Kota Tanjung Balai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Adapun informan yang terdapat dalam penelitian ini adalah ketua serta anggota dari Majelis Buddhayana Indonesia, masyarakat muslim dan masyarakat Buddha yang ada di Tanjung Balai. Data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan Peran Majelis Buddhayana Indonesia membantu terciptanya perdamaian melalui upaya mediasi, mengelola isu konflik serta membuat kesepakatan perdamaian terhadap kelompok-kelompok yang bertikai .

Kata kunci: *Majelis Buddhayana Indonesia, konflik, binadamai.*

ABSTRACT

This research is about the Indonesian Buddhayana Assembly as one of the social religious organizations in creating and building interfaith peace building between religious communities in Tanjung Balai. the purpose of this study was to determine the role and efforts of the Indonesian Buddhayana Assembly in managing conflict issues after the burning of Tri Ratna temple in Tanjung Balai city. The method used in this study is a qualitative method through a descriptive approach. The informants contained in this study were the chairmen and members of Indonesian buddhist assembly, the muslim community and the buddhist community in Tanjung Balai. Data obtained through observation, literature study interviews and documentation. The result of the study illustrate the role of the Indonesian Buddhayana Assembly to help create peace through mediation efforts, manage conflict issues and make peace agreements with conflicting groups.

Keywords : Indonesian Buddhayana Assembly, Conflict, Peace Building.

PENDAHULUAN

Agama senantiasa ditafsirkan secara paradoks. Pada satu bagian, agama sebagai membawa pesan perdamaian di kalangan umatnya. Bagian yang lainnya, cenderung digunakan sebagai alat untuk memunculkan rasa permusuhan hingga memicu konflik atas nama perbedaan (Fauzi dan Pangabean, 2017). Perbedaan merupakan kenyataan yang sudah ada sejak dari awal ketika kehidupan manusia ini di ciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia maka perbedaan merupakan suatu kenyataan yang di anugerahkan akan senantiasa melekat pada diri manusia maka dari itu akan tetap ada sepanjang sejarah kehidupan manusia, hal tersebut bermakna dalam menjalani kehidupan sosialnya maka setiap individu atau manusia akan selalu ada dalam perbedaan yang tidak dapat di hindari.

Maka dari itu Kekerasan atas nama agama yang merupakan bagian dari perbedaan keberagaman yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu memberikan dampak terhadap keharmonisan masyarakat. Sebagaimana dipahami, agama sebagai medium yang seharusnya mengajarkan kedamaian, toleransi, serta penghargaan terhadap yang lainnya justru melahirkan kekerasan atas nama agama, (Fauzi, 2017; Naim, 2012). Memasuki era reformasi, seiring berkembangnya kebebasan masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi isu agama semakin mudah di perbincangkan di tengah- tengah masyarakat baik dari mulut ke mulut, maupun dari media massa. Isu agama tersebut menjadi salah satu “menu” wajib yang tidak henti-hentinya menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia yang dapat menimbulkan atau memicu konflik. Segala peristiwa terkait agama, kelompok agama, ajaran agama tindakan beragama, terlebih konflik agama selalu menjadi sorotan.

Pada tahun 2016 yang lalu konflik antarumat agama terjadi di Kota Tanjung Balai Sumatra Utara, tepatnya di jalan Asahan Kelurahan Indra Sakti Kota Tanjung Balai. Konflik yang terjadi dipicu dengan teguran yang diberikan salah seorang ibu yang bernama Meliana (penganut agama buddha) terkait dengan pengeras suara yang berasal dari Masjid Al-Maksum yang berada di Jalan. Karya yang dianggap oleh ibu Meliana mengganggu. Ketersinggungan tersebut menyulut Jemaah yang berada di mesjid Al-Maksum dan masyarakat sekitar untuk bereaksi,

dan dianggap tidak menghargai kelompok yang sedang melakukan ibadah sholat. Akibatnya, terjadi pembakaran vihara yang dilakukan sekelompok orang yang terprovokasi atas isu-isu tersebut (Arfanda, 2017, Irwansyah, 2013, Mulizar, 2013).

Pasca terjadinya konflik, banyak organisasi sosial keagamaan yang ikut terlibat dalam membangun perdamaian di Kota Tanjung Balai, salah satunya adalah Majelis Buddhayana Indonesia. Majelis Buddhayana Indonesia merupakan suatu perkumpulan umat Buddha di Indonesia yang menaruh perhatian terhadap isu-isu sosial, agama dan *pluralisme*. salah satu hal yang dilakukan oleh Majelis Buddhayana Indonesia adalah upaya perdamaian dengan melakukan mediasi, mengelola isu konflik, serta berperan dalam menciptakan binadamai yaitu dengan mendekati diri kepada masyarakat lain dalam berbagai kegiatan positif. Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pelibatan Majelis Buddhayana Indonesia dalam mengelola berbagai isu konflik serta membangun binadamai antarkelompok agama paska pembakaran vihara di Tanjung Balai .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (uraikan) dan pendekatan studi kasus. Menurut Neuman (2013:197) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan bahasa kasus dan konteks, menggunakan *bricolage*, memeriksa proses dan kasus sosial dalam konteks sosial mereka, dan melihat interpretasi atau penciptaan makna dalam setting tertentu. Mereka melihat kehidupan sosial dari banyak sudut pandang dan menjelaskan bagaimana orang-orang membangun identitas. Hanya jarang mereka menggunakan variabel atau menguji hipotesis, atau mengubah kehidupan sosial menjadi angka”.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena peneliti ingin melihat dan mengamati secara langsung bagaimana Majelis Buddhayana Indonesia membangun perdamaian antarumat beragama paska konflik pembakaran Vihara di Tanjung Balai. Serta peneliti ingin mengetahui bagaimana partisipasi Buddhayana sendiri dalam meredakan isu-isu konflik yang terjadi di Tanjung Balai. Adapun lokasi penelitian yang ditentukan dalam penelitian ini adalah seputaran Jalan Asahan Kelurahan Indra Sakti kota Tanjung Balai alasan

pemilihan lokasi terkait dengan peristiwa pembakaran vihara yang juga merupakan tempat tinggal para anggota Majelis Buddhayana Indonesia.

Sumber data di peroleh melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi yang di lakukan terhadap Majelis Buddhayana Indonesia di vihara Tri Ratna. Serta dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dsb yang dapat diperoleh secara fisik (perpustakaan) maupun virtual (internet). Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi kepustakaan dan teknik analisis data yang di lakukan melalui reduksi data, penyajian data serta melakukan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teori Struktural Fungsional. Teori struktural fungsional digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian. Adapun alasan menggunakan teori struktural fungsional adalah terkait dengan fokus masalah dalam penelitian yang menitikberatkan kepada aspek keteraturan dan keseimbangan (paska konflik) dan bukan menyoroti kepada peristiwa konflik yang terjadi di Tanjung Balai. Dengan demikian penggunaan teori struktural fungsional dianggap paling relevan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Sebagaimana dijelaskan di awal, teori struktural fungsional memiliki pengaruh yang lama di dalam tradisi sosiologi (Soekanto, 2006). Asumsi dasar teori struktural fungsional adalah menekankan keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat. Masyarakat digambarkan sebagai sebuah sistem yang memilikisub-sub sistem yang berhubungan antara satu dengan lainnya. Di dalam masyarakat memiliki fungsi dan peran masing-masing. Suatu sistem akan dianggap disfungsi jika terdapat sub sistem tidak memberikan kontribusinya dengan baik dan akibatnya akan lenyap dengan sendirinya. Secara gamblang, Parson (Ritzer dan Goodman, 2004) memberikan 4 (empat) persyaratan mutlak bagi keseimbangan suatu masyarakat yang disebut AGIL, yaitu :

1) Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi di lakukan sebagai respon dari tantangan alam maupun sosial yang mengalami masalah atau perubahan, sehingga memerlukan suatu penyesuaian agar sistem dapat berjalan.

2) Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Tujuan itu tidak bisa berdiri sendiri melainkan memerlukan sokongan terhadap bagian-bagian lainnya.

3) Integerasi (*integration*)

Suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila terjadi suatu penyatuan atau integrasi dari seluruh unsur-unsur yang ada di dalamnya.

4) Letensi atau Pemeliharaan Pola (*letency*)

Pemeliharaan pola di lakukan untuk tetap mempertahankan segala sesuatu yang di miliki agar tetap berjalan dengan baik. Suatu sistem akan berjalan dengan baik apabila masing-masing unsur berfungsi dengan baik.

Keterkaitan teori struktural fungsional (AGIL) dalam penelitian ini adalah menganalisis Majelis Budharyana Indonesia sebagai struktur yang memiliki fungsi dalam mengakomodasi berbagai persoalan (isu-isu) paska konflik serta kontributor bagi kelompok-kelompok sosial keagamaan lainnya dalam membangun binadamai antarumat agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kejadian

Kerusuhan di Tanjung Balai tahun 2016 lalu bermula pada isu SARA (suku, agama, Ras, dan antar golongan) yang menyebabkan sebuah vihara yang bernama Vihara Tri Ratna Tanjung Balai, berlokasi di Jalan Asahan kelurahan Indra Sakti dan beberapa klenteng-klenteng yang ada di Tanjung Balai mengalami kerusakan dan peristiwa ini di lakukan oleh masyarakat. Vihara dan klenteng-klenteng di rusak dan di bakar oleh masyarakat pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016, yang terjadi pada malam dini hari dan menimbulkan keresahan atau kekhawatiran oleh masyarakat pada saat itu. Konflik yang terjadi bermula ketika adanya keluhan seorang warga bernama Meliana yang beragama Buddha berusia 41 tahun, yang bertempat tinggal di Jalan Karya Kelurahan Indra Sakti kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, Sumatra Utara terhadap suara adzan magrib yang pada saat itu sedang berkumandang di Masjid Al-Maksum Jalan Karya, yang bertepatan mesjid tersebut berada tepat di depan rumah ibu Meliana.

Faktor-faktor yang menyebabkan konflik mengatasnamakan agama yang terjadi di Tanjung Balai, salah satunya disebabkan karena kurangnya sikap untuk saling memahami dan menghargai agama lain serta umat beragama lain sehingga dalam kehidupan beragama tidak adanya saling menghargai hakikat dan martabat manusia dimana nilai-nilai kemanusiaan yang universal tidak berlaku lagi dalam menjalin hubungan yang harmonis antarumat beragama tersebut, terutama hati nurani dan cinta kasih bagi kerukunan masyarakat, toleransi dan persatuan dalam kemajemukan umat beragama di Tanjung Balai.

2. Peran Majelis Buddhayana Indonesia

Paska pembakaran Vihara terjadi, ketua Majelis Buddhayana Indonesia yaitu Bapak Sunardi serta tokoh-tokoh agama lainnya dan juga pemerintah atau pejabat daerah mengadakan pertemuan beserta walikota Tanjung Balai. Adapun pertemuan tersebut untuk membahas kelanjutan apa yang akan dilakukan agar kondisi masyarakat Tanjung Balai kondusif. Bapak M. Syarial sebagai walikota Tanjung Balai mengharapkan, mulai saat itu kontribusi organisasi keagamaan atau tokoh agama serta forum kerukunan antarumat bergama lainnya bisa berkontribusi untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar umat manusia. Peran yang begitu besar dari setiap elemen yang diharapkan dapat meredam permasalahan yang sedang terjadi agar tetap aman kedepannya, bukan hanya itu setelah peristiwa terjadi Majelis Buddhayana Indonesia juga mengumpulkan pihak-pihak kepala lingkungan, rukun warga serta rukun tetangga setempat untuk membantu meredam emosi masyarakat, agar tidak memperparah keadaan di Tanjung Balai. Hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Majelis Buddhayana Indonesia dalam mengelola isu-isu konflik di Tanjung Balai.

Majelis Buddhayana Indonesia beserta beberapa anggota mengadakan sosialisasi kepada beberapa warga yang bertempat tinggal di sekitaran Vihara, dan masyarakat muslim yang bertempat tinggal di di sekitaran masjid Al-Maksum, yang bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya toleransi sesama umat manusia walaupun dalam perbedaan dan keberagaman, agar tidak timbul kembali rasa benci atau dendam terhadap masyarakat etnis Buddha yang ada di Tanjung Balai. kegiatan yang dilakukan tidak dilakukan secara terperinci, akan tetapi kegiatan ini

juga membuat rasa peduli masyarakat sekitar untuk membantu membersihkan lingkungan atau pekarangan Vihara yang di rusak oleh masyarakat. Sosialisasi itu juga di bantu oleh aparat kepolisian yang berjaga paska terjadinya konflik, masyarakat yang turut dalam kegiatan tersebut di harapkan dapat mewakili masyarakat umat Buddha sebagai jalan awal umat Muslim dapat menjalin hubungan yang baik dengan umat Buddha di Tanjung Balai serta masyarakat lain yang juga berbeda keyakinan.

Analisis Parsons melalui skema AGIL menggambarkan proses adaptasi yang di lakukan oleh Majelis Buddhayana Indonesia terhadap masyarakat, yang diawali dengan melakukan pertemuan bersama para tokoh-tokoh agama dan berdiskusi dalam penyelesaian konflik, yang memberikan ruang kepada Majelis Buddhayana Indonesia serta umat buddha untuk dapat dekat dengan masyarakat yang berkonflik khususnya umat muslim. Dengan begitu Majelis Buddhayana Indonesia dapat mengetahui persoalan yang menjadi pemicu atau latar belakang dari peristiwa yang terjadi. Maka dari itu Majelis Buddhayana Indonesia dapat melakukan tindakan untuk menghentikan pertikaian atau konflik yang terjadi. Majelis Buddhayana Indonesia mengalami proses adaptasi kepada masyarakat muslim, yaitu dengan menyesuaikan diri terlebih dahulu terhadap lingkungan. Hal ini di karenakan Buddhayana adalah organisasi internal yang hanya di ketahui masyarakat Buddha keberadaannya dan tidak di kenal oleh masyarakat luas di luar dari umat buddha.

Selain itu Majelis Buddhayana Indonesia di Tanjung Balai juga menjalankan kegiatan dalam bidang sosial. Kegiatan sosial bukan hanya untuk umat Buddha itu sendiri tetapi juga untuk seluruh masyarakat Tanjung Tanjung balai paska terjadinya konflik yang terjadi di Tanjung Balai, seperti Menyelenggarakan, menyediakan, dan mendirikan kelompok bermain, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, kursus, pelatihan dan keterampilan, pendidikan yang di berikan ini dalam bentuk informal dan pendidikan non formal, ini di berikan untuk semua masyarakat Tanjung Balai tanpa membedakan agama dan masih hingga saat ini. Hal lain yang di lakukan oleh Majelis Buddhayana Indonesia melakukan kegiatan sosialisasi untuk

menambah wawasan masyarakat Tanjung Balai tentang pentingnya toleransi antar umat beragama, selain itu kegiatan yang di lakukan adalah donor darah, donor darah menjadi kegiatan setiap enam bulan yang di adakan untuk masyarakat.

Analisis Parsons melalui skema AGIL memperlihatkan bagaimana pencapaian tujuan yang di lakukan oleh Majelis Buddhayana Indonesia paska terjadinya konflik atau kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai. Dimana Majelis Buddhayana Indonesia melalui kegiatan-kegiatan seperti, sambung rasa, pendidikan buat anak-anak, hingga pada aksi bakti sosial dan kegiatan donor darah merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan yang di harapkan menjadi salah satu bentuk binadama yang di berikan oleh Majelis Buddhayana Indonesai sehingga tujuan-tujuan itu dapat di rasakan oleh masyarakat dan juga menjadi proses pendamaian agar konflik tidak terjadi kembali melainkan menumbuhkan sikap peduli, saling menghargai dan menjaga kedamaian antar sesama di Tanjung Balai.

3. Upaya Majelis Buddhayana Indonesia dalam Menciptakan Binadamai Antarumat Beragama.

a. Mediasi

Majelis Buddhayana Indonesia berperan sebagai pihak orang ketiga atau mediator dari perselisihan yang terjadi antara masyarakat Muslim dan Buddha di Tanjungbala. Majelis Buddhayana Indonesia melakukan usaha pendekatan dengan masyarakat Muslim dan umat Buddha. Serta memberikan perhatian yang besar dan menampung aspirasi masyarakat yang berkonflik maupun yang menjadi sasaran konflik oleh masa. Dengan seperti ini Majelis Buddhayana Indonesia serta yang berkonflik dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan, sebelum itu Majelis Buddhayana Indonesia mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan. Kemudian tindakan yang di lakukan oleh Majelis Buddhayana Indonesia adalah meminta masyarakat yang berkonflik supaya memberikan kesepakatan untuk meredam atau berdamai agar tidak mengulang kembali konflik yang serupa. Pencapaian akhir dari mediasi yang di lakukan oleh Majelis Buddhayana Indonesia kepada masyarakat yaitu penanda

tanganan kesepakatan perdamaian untuk berdamai antara masyarakat Muslim dan masyarakat Buddha.

Sistem integrasi yang telah di kemukakan Parsons dalam hal ini adalah proses Mediasi yang merupakan bagian dari proses pengelolaan konflik, yang di lakukan oleh Majelis Buddhayana Indonesia dengan tujuan agar terselesaikan nya konflik yang di bantu oleh orang pihak ketiga, dan juga bermaksud untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Majelis Buddhayana Indonesia. masyarakat berdamai dan berperan dalam membantu menyelesaikan konflik agama yang terjadi antara masyarakat Muslim dan Buddha adalah bagian dari tujuan Majelis Buddhayana Indonesia, adapun dari tujuan yang di capai oleh Majelis Buddhayana Indonesia adalah perdamaian antara kedua belah pihak yang berkonflik, serta dapat meredam terjadinya konflik yang semakin besar dan berlanjut. Proses integrasi ini berjalan dengan baik karena terjadinya suatu kerjasama yang baik dari pihak yang berkonflik dan pihak yang bermediasi.

Majelis Buddhayana Indonesia juga turut melakukan kegiatan gotong royong yang mengikut sertakan beberapa masyarakat dari wilayah jalan karya, serta beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran vihara untuk membantu gotong royong membersihkan lingkungan jalan karya dan juga Vihara Tri Ratna, keikutsertaan tersebut juga merupakan dalam kegiatan binadamai yang di lakukan oleh Majelis Buddhayana Indonesia. Majelis Buddhayana Indonesia juga hadir untuk berupaya memperbaiki keadaan atau situasi di Tanjung Balai paska peristiwa tersebut, Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hidup bagaimana hidup damai dalam keberagaman tanpa melihat adanya perbedaan antar masyarakat yang buat dalam bentuk pertemuan atau sosialisasi oleh umat buddha untuk umat lainnya. Pertemuan untuk gotong royong yang di lakukan masyarakat bersama Majelis Buddhayana Indonesia dan umat buddha juga menunjukkan sikap menerima perbedaan dan bekerjasama dengan baik, selain itu pedidikan untuk anak-anak, kegiatan lainnya adalah aksi donor darah pada tahun 2017 lalu di mana hasil dari donor darah ini di berikan ke rumah beberapa rumah sakit yang memiliki pasien yang membutuhkan darah. Setiap kegiatan yang di berikan kepada masyarakat Tanjung Balai agar dapat membantu

mengembalikan situasi kembali damai dan mengurangi rasa benci atau dendam terhadap masyarakat buddha.

Kerusuhan-kerusuhandan pembakaran vihara serta beberapa kelenteng yang terjadi pada tanggal 29 juli 2016 di Tanjung Balai dilakukan oleh sekelompok masyarakat muslim yang kebanyakan dari mereka adalah anak-anak mud. Kejadian tersebut di picu oleh keluhan seorang ibu yang beretnis Thionghoa beragama buddha terhadap suara adzan magrib yang berkumandang di masjid Al-Maksum. Akibat keluhan ibu Meliana membuat beberapa orang yang berada di masjid pada saat itu marah dan tersulut emosi, sehingga berujung pada provokasi kepada sekelompok umat muslim lain untuk melakukan kerusuhan sebagai bentuk balas dendam terhadap sekelompok umat Buddha yang merupakan kelompok minoritas yang berawal dari ketidaknyamanan ibu Meliana terhadap suara adzan tersebut. Seiring berjalannya waktu, keharmonisan antara Muslim-Buddhis menjadi berkurang, adanya provokasi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang toleransi yang menyebabkan munculnya rasa benci kepada masyarakat Buddha yang berujung pada perusakan dan meresahkan banyak masyarakat di Tanjung Balai.

Interaksi masyarakat Muslim dengan Buddha yang terjadi secara alamiah sebagaimana telah di singgung sebelumnya. interaksi kedua pihak ini terjadi dalam bentuk hubungan antara etnis china dengan etnis melayu yang pada awalnya memang masyarakat menaruh kecemburuan terhadap perbedaan tingkat perekonomian masyarakat Tanjung Balai. Umumnya masyarakat melayu atau masyarakat muslim lebih banyak menjadi pekerja, seperti nelayan atau buruh dan kaum minoritas Buddha yang kebanyakan menjadi pemegang perekonomian atau bos (tokeh) di Tanjung Balai.

Bertemunya kedua belah pihak yang berkonflik mempermudah Majelis Buddhayana Indonesia untuk dapat meredam kemarahan masyarakat pada saat itu. Cara yang di lakukan oleh buddhayana cukup efektif untuk membuat situasi atau kondisi menjadi lebih aman. Namun proses atau cara lain yang di lakukan oleh Majelis Buddhayana Indonesia adalah meminta pendapat terkait permasalahan tersebut kepada pihak Majelis Ulama Indonesia. Pendapat tersebut untuk

mengetahui bersama apa yang harus dilakukan kepada ibu Meliana dan kepada masyarakat yang melakukan pembakaran, dan memberikan hasil bahwa kedua belah pihak bersalah. Akan tetapi ibu meliana di jatuhkan hukuman terkait dengan protes suara adzan yang beliau lakukan.

Majelis Buddhayana Indonesia memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap ketenangan paska terjadinya konflik, seperti yang telah di katakan oleh beberapa informan yang memberikan informasi mengenai keberadaan Majelis Buddhayana Indonesia yang juga menjadi salah satu masyarakat yang meraskan keberadaan dari Majelis Buddhayana Indonesia, namun mungkin masih ada masyarakat belum mengenal Majelis Buddhayana Indonesia. setelah kejadian buddhayana berusaha mendekatkan dan menempatkan dirinya kepada masyarakat, upaya yang di lakukan Majelis Buddhayana Indonesia salah satunya adalah memperkecil isu-isu agar tidak berujung pada kerusuhan dan keributan. Namun sampai saat ini gesekan-gesekan yang dapat memicu konflik tidak terjadi di wilayah sekitaran vihara terutama di Kota Tanjung Balai. Tika berharap agar setiap masyarakat yang berbeda hendaknya selalu hidup rukun dan damai serta saling menghargai.

b. Proses Mengelola Konflik

Dalam hal ini Majelis Buddhayana Indonesia juga melakukan beberapa bentuk akomodasi dalam penyelesaian konflik yang terjadi yaitu dengan bentuk *minority consent* yang artinya penyelesaian konflik yang terjadi karena golongan minoritas tidak merasa di kalahkan karena mereka masih dapat melakukan kegiatan atau hidup bersama-sama dengan kelompok mayoritas, hal ini berkaitan dengan apa yang di lakukan oleh umat buddha terhadap kejadian yang di alami oleh mereka. Paska konflik yang terjadi di Tanjung Balai, Majelis Buddhayana indonesia yang merupakan salah satu pusat terencananya aktivitas atau kegiatan keagamaan untuk umat buddha merangkul kembali keharmonisan dan kekeluargaan umat budhha dengan masyarakat muslim, terutama masyarakat muslim yang berada di sekitaran jalan asahan, salah satunya adalah Majelis Buddhayana Indonesia mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, serta masyarakat muslim sendiri dengan tujuan untuk menjalin kembali hubungan baik

antara kedua belah pihak agar tidak terjadi kembali masalah-masalah yang dapat merusak rasa toleransi antar masyarakat dan di harapkan dapat memperstaukan keberagaman. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya konflik di Tanjung Balai utamanya adalah yang paling utama masyarakat yang bertikai, kemudian pihak pemerintah baik daerah seperti kepala lingkungan, kepala camat, walikota, dan sebagainya maupun pemerintah pusat yang tentunya berkoordinasi dengan kelompok-kelompok keagamaan yang ada di Tanjung Balai seperti Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Buddhayana Indonesia, akan tetapi Majelis Buddhayana Indonesia sebagai kelompok keagamaan yang aktif dalam proses pengelolaan konflik yang terjadi juga merangkul forum-forum keagamaan lainnya guna untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

Kesepakatan Perdamaian

Setelah terjadinya kerusuhan dan pembakaran vihara di Tanjung Balai Majelis Buddhayana Indonesia dan sejumlah Ormas (organisasi masyarakat) lainnya melakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri pertikaian yang berujung pada perusakan vihara di Tanjung Balai, kesepakatan ini merupakan langkah untuk meredam dan meluasnya kerusuhan yang dapat merugikan semua pihak. Kedamaian terjadi setelah di tanda tangani nya surat perdamaian yang di lakukan oleh pemerintah kota serta lintas agama dari beberapa etnik tersebut. Ketua Majelis Buddhayana Indonesia Kota Tanjung Balai Sunardi menerima baik perdamaian yang di lakukan antarumat beragama yang sebelumnya sempat bertikai di Tanjung Balai. Sejumlah elemen masyarakat yang melakukan penanda tanganan perdamaian adalah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB), Komite Nasional Pemuda Indonesia, Badan Komunkasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia, dan Majelis Buddhayana Indonesia.

Simpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Buddhayana Indonesia berperan dalam meredam konflik paska pembakaran vihara yang terjadi di Tanjungbalai melalui proses perdamaian.

2. Upaya yang dilakukan terkait menjadi pihak menengahi kepada kelompok-kelompok yang bertikai dan membangun bina damai yang positif antar umat beragama, yakni Islam dan Budha.
3. Dilakukan penandatanganan oleh Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB), Komite Nasional Pemuda Indonesia, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, dan Majelis Buddhayana Indonesia kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri pertikaian.

Saran

1. Majelis-majelis keagamaan perlu di dorong untuk memahami masalah-masalah sosial dan tidak hanya fokus keagamaan saja.
2. Lembaga-lembaga antar agama perlu memberikan pemahaman mendalam terkait keragaman beragama yang ada di Indonesia.
3. Pemerintah daerah perlu mendorong dan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga kerukunan antar umat beragama dapat terpelihara dengan baik.

Daftar Pustaka

- Arfanda, M. B. (2017). *Pemberitaan Konflik Tanjungbalai (Analisis isi pemberitaan konflik tanjung balai di surat kabar republika dan Kompas edisi 3 juli 2016)*. Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Fauzi, Ihsan Ali dan Panggabean, Rizal. 2017. *Pekerja Binadamai Dari Tanah Pasundan*. Jakarta : PUSAD Paramadina
- Irwansyah. 2013. *Potensi Keretakan Hubungan Sosial Muslim-Buddhis (Kasus Konflik Patung Buddha di Kota Tanjungbalai Sumatra Utara)*. Jurnal Analisa. Vol.20(02) : 155-161
- Hanana, Alna, dan Mulizar, Arif. 2017. *Media Dalam Pemberitaan Tanjungbalai Asahan (Studi Analisis Farming tentang Kerusuhan Tanjungbalai Asahan direpublika.co.id)*. Jurnal Komunikasi dan Media. Vol.2(01) : 48-62
- Neuman, W, Lawrence. 2013. *Metode Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta Barat : PT. Indeks Permata Puri Media
- Naim, N. (2012). *Harmoni, Aliran Paham dan Gerakan Keagamaan dalam Perspektif Toleransi Beragama*. *Jurnal Harmoni*. Vol.11(04): 6-10